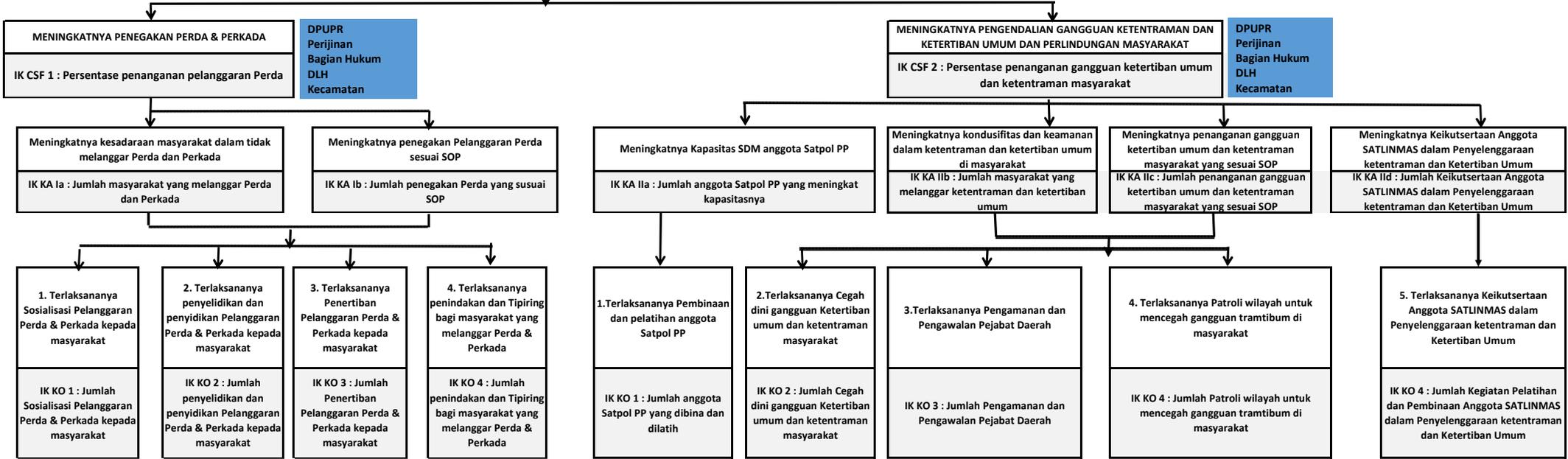


5.1 POHON KINERJA SATPOL PP KABUPATEN MOJOKERTO

TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG OPTIMAL
IK OUTCOME : Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda



CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026

Misi 2 (Kepala Daerah)

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman masyarakat

Tujuan 1 (Kepala Daerah)

Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter

Indikator Tujuan (Kepala Daerah)

Indeks Kesalehan sosial

Sasaran (Kepala Daerah)

Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama

Indikator Sasaran (Kepala Daerah)

Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Tujuan OPD

Terwujudnya ketentraman masyarakat dan kerukunan umat beragama

Indikator Tujuan OPD

Indek Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sasaran OPD

Meningkatkan rasa aman dan nyaman melalui penyelenggaraan ketertiban, ketenterman dan perlindungan masyarakat serta penegakan Perda

Indikator Sasaran OPD

Prosentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Perda

Program OPD

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Program OPD

1. Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

2. Persentase pelanggaran Perda yang tertangani

Kegiatan OPD

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Indikator Kegiatan OPD

1. Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub Kegiatan OPD

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

9. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

10. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

11. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

8. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada

Indikator Sub Kegiatan OPD

1. Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

2. Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

4. Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban

5. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

6. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

7. Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia

9. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha

10. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

11. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP

8. Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani